

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU
DARI KONVENSI WINA 1961
(STUDI KASUS PENYADAPAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA)**

Oleh

Desak Komang Budiarsini, NIM. 1814101040

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik deskriptif dan teknik argumentasi serta diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27 ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi pihak Australia terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 terkait kasus penyadapan yang dilakukan di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi dengan pembentukan protokol *Code of Conduct (CoC) on framework for security cooperation* berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (*mutual consent*).

Kata Kunci: Penyadapan, Pertanggungjawaban Negara, Konvensi Wina 1961

**STATE RESPONSIBILITY AGAINST ABUSE OF DIPLOMATIC
IMMUNITY RIGHTS REVIEWED FROM THE VIENNA CONVENTION
1961
(AUSTRALIAN WIRETAPPING CASE STUDY AGAINST INDONESIA)**

By

Desak Komang Budiarsini, NIM. 1814101040

Law Departement

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the legal arrangements contained in the 1961 Vienna Convention relating to the abuse of diplomatic immunity rights against wiretapping cases carried out by Australia in Indonesia and to identify and examine the state's responsibility for wiretapping by Australia against Indonesia. Related to the type of research used is the type of normative legal research, so the approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is descriptive and argumentative techniques and is described systematically on the problems encountered. The results of this study indicate that 1) There are legal rules that have been violated related to wiretapping by Australia against Indonesia as regulated in article 3 paragraph 1 letter (d), article 27 paragraph 1 and article 41 paragraph 1 of the 1961 Vienna Convention, 2) There is accountability Australia must comply with the abuse of diplomatic immunity rights in the 1961 Vienna Convention related to wiretapping cases carried out in Indonesia. Accountability is carried out by peaceful dispute resolution or negotiations by establishing a Code of Conduct (CoC) protocol on the framework for security cooperation based on the principle of mutual consent.

Keywords: Wiretapping, State Accountability, 1961 Vienna Convention